

# SIINFO

2024

# Triwulan IV LAPORAN MONITORINGAN CAPAIAN KINERJA MEGERI

#### **DISUSUN OLEH:**

BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

© (021) 3811308, 3505006

☑ pusdatin@dephub.go.id

www.dephub.go.id



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Biro Komunikasi dan Informasi Publik sebagai salah satu unit kerja *support* dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terus berupaya untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Kementerian Perhubungan telah berbasis *outcome*. Penyempurnaan IKK memberikan dampak sinergitas berupa penyempurnaan indikator kinerja bagi seluruh Unit Kerja di Kementerian Perhubungan, baik di lingkungan Unit Kerja Eselon I maupun Unit Kerja Eselon II. Selain itu, IKK yang telah disempurnakan juga mendorong Kementerian Perhubungan untuk melakukan Reviu Renstra Tahun 2020-2024 yang diikuti dengan penyusunan Reviu Renstra Tahun 2020- 2024 pada unit kerja Eselon I dan unit kerja Eselon II di bawahnya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan capaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada awal tahun anggaran, Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah menetapkan target kinerja untuk tahun berjalan melalui Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir, Biro Komunikasi dan Informasi Publik berkewajiban untuk melaporkan Laporan Kinerja yang merupakan suatu wujud transparansi dan akuntabilitas Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

Penilaian pengukuran tingkat capaian kinerja secara final dilakukan pada laporan TW IV ini dan pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2024 dilakukan pada bulan Desember 2024 dan dilaporkan pada TW IV, terlampir hasil penilaian IKU Biro KIP yang meliputi IKU Reputasi Positif Kementerian Perhubungan, IKU Profesionalisme ASN di Biro Komunikasi dan Informasi Publik, serta IKU Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran.

Pagu awal DIPA Biro KIP Tahun Anggaran 2024 semula adalah sebesar Rp. 26.703.880.000,- dan berubah menjadi Rp. 26.433.880.000 setelah mengalami 11 Kali revisi. Revisi tersebut diantaranya Revisi I pada tanggal 25 Januari 2024 dan terdapat *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp775.879.000,-, revisi ke II pada tanggal 16 Februari 2024, revisi ke III pada tanggal 22 April 2024, revisi ke IV pada tanggal 3 Juni 2024, revisi ke V (revisi anggaran antar satker) pada tanggal 26 Juni 2024, revisi ke VI pada tanggal 10 Juli 2024, revisi ke VII pada tanggal 3 September 2024, revisi ke VIII pada tanggal 14 Oktober 2024, revisi ke IX pada tanggal 15 November 2024 yang terdapat penghematan Belanja Perjadin sebesar Rp344.095.000, revisi ke X pada tanggal 29 November 2024, serta revisi ke XI pada tanggal 30 Desember 2024 yang merupakan pemutakhiran halaman III DIPA. Daya serap keuangan selama Triwulan IV sebesar Rp. 25.294.193.335,- sehingga capaian realisasi keuangan sebesar 99,92%.





### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulanan IV Biro Komunikasi dan Informasi Publik dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai perwujudan pelaksanaan PM Perhubungan No. 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Monitoring Kinerja Triwulanan IV Biro Komunikasi dan Informasi Publik ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diemban dan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian sasaran dan kegiatan yang ada.

Berbagai upaya telah dilakukan Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam mewujudkan kebijakan perencanaan dan pemrograman sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan sektor perhubungan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemberian komunikasi dan informasi Kementerian Perhubungan dan perwujudan keberhasilan program komunikasi.

Sangat disadari bahwa Laporan Monitoring Kinerja Triwulanan IV Biro Komunikasi dan Informasi Publik ini belum secara sempurna menyajikan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan guna perbaikan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulanan Biro Komunikasi dan Informasi Publik di masa mendatang.

KEPALA BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

BUDI RAHARDJO NIP. 19701106 199703 1 001





#### **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	5
PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tugas dan Fungsi Biro Komunikasi dan Informasi Publik	6
1.3 Pelaksanaan Urusan dan Struktur Organisasi Biro KIP	10
1.4 Peran dan Isu Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik	11
1.5 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	13
1.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
1.7 Sistematika Laporan	17
CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN	18
2.1 Capaian Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik	18
2.2 Realisasi Anggaran	21
PENUTUP	24
3.1 Kesimpulan	24
3.1 Saran	24
LAMPIRAN	27
4.1 Lampiran I : Perjanjian Kinerja Tahun 2024	28
4.2 Lampiran II.: Rencana Kineria Tahunan Tahun 2024	31



#### **DAFTAR TABEL**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro KIP Kemenhub	11
DAFTAR GAMBAR	
Tabel 2.2 Capaian Sasaran Kegiatan dan Realisasi Anggaran Biro KIP	22
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik	18
Tabel 1.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Biro KIP	13



#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governace* yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut, salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun anggaran 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Laporan Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik digunakan sebagai salah satu alat pemacu peningkatan dan perbaikan kinerja unit eselon kerja di lingkungan internal maupun di lingkungan Sekretariat Jenderal. Laporan Kinerja juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor: 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 85 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

#### 1.2 Tugas dan Fungsi Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Biro Komunikasi dan Informasi Publik adalah Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan yang keberadaannya mengacu pada Peraturan Menteri



Perhubungan Nomor: PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, yang memiliki tugas dan fungsi berupa:

"Biro Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemberian dukungan pelaksanaan komunikasi dan informasi publik serta juru bicara Kementerian Perhubungan"

Dalam melaksanakan tugas Biro Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, perencanaan, pengendalian program komunikasi publik, penyusunan perumusan dan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan, penanganan krisis komunikasi, pengukuran opini publik, analisis, monitoring, evaluasi, pelaporan program komunikasi publik, kepegawaian, keuangan, pengelolaan Jabatan Fungsional bidang kehumasan, serta dukungan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pemberian informasi publik, menjalin hubungan dengan pelaku media massa, serta koordinasi, pengelolaan, pelaksanaan aktivitas komunikasi publik dan membentuk opini sektor transpor tasi melalui jejaring warganet dan komunitas;
- c. penyiapan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik, edukasi publik, pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan pelayanan informasi publik, penyelesaian dan asistensi penanganan sengketa informasi publik, serta dokumentasi kinerja dan kegiatan pimpinan; dan
- d. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi;
- b. Bagian Pernberitaan dan Media Sosial;
- c. Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi; dan



d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, perencanaan, pengendalian program komunikasi publik, penyusunan perumusan dan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan, penanganan krisis komunikasi, pengukuran opini publik, analisis, monitoring, evaluasi, pelaporan program komunikasi publik, kepegawaian, keuangan, pengelolaan Jabalan Fungsional bidang kehumasan, serta dukungan reformasi birokrasi, serta tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan pembinaan, perencanaan, pengendalian program komunikasi publik serta penyusunan perumusan dan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan;
- b) Penyiapan bahan penanganan krisis komunikasi, pengukuran opini publik, analisis, monitoring, evaluasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta pelaporan program komunikasi publik;
- c) Penyiapan bahan urusan kepegawaian, pengelolaan Jabatan Fungsional bidang kehumasan, keuangan, dukungan reformasi birokrasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, Pengelolaan layanan Pengadaan dan Barang Milik Negara serta tata usaha dan rumah tangga Biro

Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsionial.

#### **Bagian Pemberitaan dan Media Sosial**

Bagian Pemberitaan dan Media Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pemberian informasi publik, menjalin



hubungan dengan pelaku media massa, serta koordinasi, pengelolaan, pelaksanaan aktivitas komunikasi publik dan membentuk opini sektor transportasi melalui jejaring warganet dan komunitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pemberitaan dan Media Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pemberian informasi publik, menjalin hubungan dengan pelaku media massa, optimalisasi pemanfaatan rubrik dan program media melalui pemberian informasi publik, penerbitan siaran pers tanggapan/, pembaca;
- b. Penyiapan bahan penyusunan, dan pelaksanaan komunikasi publik melalui pernanfaatan media sosial;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pengelolaan, pelaksanaan aktivitas komunikasi publik dan membentuk opini sektor transportasi melalui jejaring warganet dan komunitas.

Bagian Pemberitaan dan Media Sosial terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi

Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi mernpunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik, edukasi publik, pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokurnentasi, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan pelayanan informasi publik, penyelesaian dan asistensi penanganan sengketa informasi publik, serta dokumentasi kinerja dan kegiatan pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik dalam bentuk publikasi pesan layanan masyarakat dan penerbitan;



- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik dalam rangka edukasi publik melalui penyelenggaraan event pameran, *below the line*, sosialisasi, promosi dan kampanye kebijakan dan kinerja pimpinan; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan pelayanan informasi publik, penyelesaian dan asistensi penanganan sengketa informasi publik, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta dokumentasi kinerja dan kegiatan pimpinan.

Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

# 1.3 Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro dan Struktur Organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Komunikasi dan Informasi Publik diperkuat oleh 64 personil, antara lain didukung oleh:

- 1) Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
- 2) Kepala Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi Dan Evaluasi
- 3) Kepala Bagian Publikasi Dan Pelayanan Informasi
- 4) Kepala Bagian Pemberitan dan Media Sosial

5) Pranata Humas Ahli Muda : 2 Orang

6) Pranata Humas Ahli Pertama : 17 Orang

7) Penelaah Teknis Kebijakan : 27 Orang

8) Penyusun Rencana Program Anggaran dan Renstra : 1 Orang

9) Pranata Keuangan APBN Terampil : 1 Orang

10) Pengolah Data dan Informasi : 1 Orang

11) Pengadministrasi Perkantoran : 1 Orang

12) Perencana Ahli Pertama : 2 Orang

13) PPNPN : 8 Orang



Dengan Latarbelakang (background) Pendidikan:

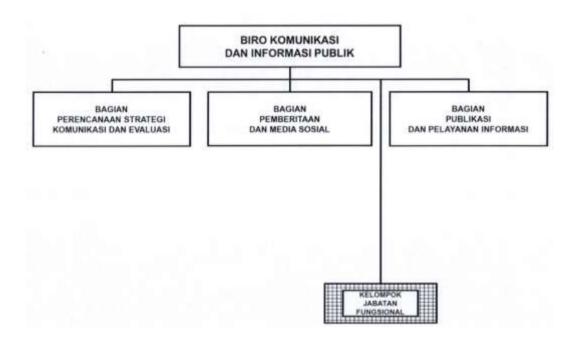
1. S2: 7 orang

2. S1: 48 orang

3. D-III: 7 orang

4. SLTA: 2 orang

Berdasarkan analisis kebutuhan pegawai, jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk mencapai kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik secara optimal. Berikut ini adalah struktur organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik berdasarkan PM 17 Tahun 2022:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub

#### 1.4 Peran dan Isu Strategis Biro Komunikasi dan informasi Publik

Sebagai unit kerja yang berada dalam koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, maka pelaksanaan kegiatan dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan harus merupakan turunan dari sasaran program Sekretariat Kementerian Perhubungan. Dari Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024 yang tertuang dalam KP 1365 Tahun 2023



diketahui bahwa Program Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang berkorelasi dengan Komunikasi dan Informasi Publik adalah:

"Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan" dengan 3 (tiga) Sasaran Program yang harus didukung oleh unit kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik yakni:

- "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", dengan Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Reputasi Positif Kementerian Perhubungan;
- 2. "Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik", dengan Sasaran Kegiatan (SK) Profesionalisme ASN di Biro Komunikasi dan Informasi Publik dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Profesionalisme ASN di Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
- 3. "Meningkatnya Birokrasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang Bersih dan Akuntabel", dengan Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya Birokrasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang Bersih dan Akuntabel dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran.

Sasaran Program tersebut, selanjutnya menjadi acuan bagi Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan untuk menentukan kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan kerja bagi Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan di tahun 2020-2024.

Kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan adalah "Pengelolaan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub di Bidang Perhubungan".

#### 1.5 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan



dalam Rencana Startegis (Renstra) mencangkup periode tahunan yang sifatnya sangat strategis karena menjembatani perencanaanstrategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dengan demikian, RKT berperan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra dengan tujuan perencanaan tahunan pembangunan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Biro Komunikasi dan Informasi Publik menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Renstra Setjen 2020-2024 dan Renstra Biro KIP 2020-2024. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Komunikasi dan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

	RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024 BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK								
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN / KOMPONEN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB		
1	2	3	4	5	6	7	9		
1	Meningkatnya Kualitas Layanan	Reputasi Positif Kementerian Perhubungan	Nilai	79	Pengelolaan Portal Lapor Pelayanan	117.200.000 350.951.000	BIRO KIP		
	Komunikasi dan Informasi Publik				Informasi Publik Pelaksanaan Komunikasi Publik Melalui Publikasi Media Internal	1.505.000.000			
					Pelaksanaan Komunikasi Publik Melalui Jejaring Internal	350.000.000			
					Penyusunan Profil Kementerian	3.038.000			
					Kampanye Kolaborasi	1.133.180.000			
					Perencanaan Strategi dan Evaluasi Komunikasi	1.023.029.000			
					Analisis Berita dan Opini Publik	748.140.000			
					Pengelolaan media sosial	2.502.676.000			
					Pengelolaan Jejaring Eksternal	1.754.628.000			
					Pengelolaan Hubungan Pers dan Media	1.209.829.000			



			1				
					Komunikasi Melalui Publikasi Media	3.278.196.000	
					Kegiatan Edukasi Publik	1.237.978.000	
					Dokumentasi dan Peliputan	2.984.436.000	
					Pimpinan		
2	Meningkatnya	Profesionalisme	Nilai	75	Pelayanan Rumah	100 020 000	BIRO KIP
	Kapabilitas	ASN di Biro			Tangga	180.020.000	
	Kepegawaian	Komunikasi dan Informasi Publik			Pengembangan	620 225 000	
	dan Organisasi Biro	IIIIOIIIIasi Publik			Kompetensi SDM	620.225.000	
	Komunikasi				Pembinaan Administrasi	471.547.000	
	dan Informasi				Kepegawaian	471.547.000	
	Publik				Monitoring dan	100.000.000	
					Evaluasi Reformasi	100.000.000	
					Birokrasi		
					Dukungan	200.000.000	
					Manajemen		
					Reformasi		
					Birokrasi Pada		
					Area Perubahan		_
3	Meningkatnya	Kualitas	Nilai	75	Operasional dan	3.564.997.000	BIRO KIP
	Birokrasi Biro	Penyelenggaraa			Pemeliharaan		
	Komunikasi dan Informasi	n Perkantoran			Kantor Kendaraan	1.516.434.000	
	Publik yang				Bermotor	1.516.434.000	
	Bersih dan				Perangkat	707.573.000	
	Akuntabel				Pengelolaan Data	101.515.000	
					dan Informasi		
					Pembinaan	366.486.000	
					Perencanaan dan		
					Penganggaran		
					UPT/ Satuan Kerja		
					Monitoring dan	143.800.000	
					Evaluasi		
					Akuntabilitas		
					Kinerja UPT/		
					Satker Monitoring dan	124 FEG 000	
					Monitoring dan Evaluasi	134.556.000	
					Pelaksanaan		
					Anggaran UPT/		
					Satker		
					Pengelolaan	229.961.000	
					Laporan Keuangan		
					Kementerian		
					Perhubungan		

#### 1.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan



kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja 2024 disusun oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik sebagai unit kerja Eselon II yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Eselon I yaitu Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Perjanjian kinerja 2024 ini berisi penugasan dari Kepala Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan kepada Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik diberikan mandat untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kepala Sekretariat Jenderal akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja yang sudah disepakati serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan kinerja yang sudah dicapai berdasarkan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja tahun 2024 Biro Komunikasi dan



Informasi Publik terdiri dari 3 (tiga) sasaran kegiatan yang mana masing-masing sasaran kegiatan terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu:

- SK 1 yaitu "Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik" dengan indikator kinerja "Reputasi Positif Kementerian Perhubungan" dengan target nilai minimal yang harus dicapai yaitu sebesar 79.
- 2) SK 2 yaitu "Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik" dengan indikator kinerja "Profesionalisme ASN di Biro Komunikasi dan Informasi Publik" dengan target nilai minimal yang harus dicapai yaitu sebesar 75.
- 3) SK 3 yaitu "Meningkatnya Birokrasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang bersih dan akuntabel" dengan indikator kinerja "Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran" dengan target nilai minimal yang harus dicapai yaitu sebesar 75.

Kegiatan yang diemban oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang masing-masing dialokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang sudah dianggarkan. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu:

- 1. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 17.072.148.000, -;
- 2. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM dengan anggaran sebesar Rp. 1.273.145.000, -;
- 3. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 6.968.613.000, -.



#### 1.7 Sistematika Laporan

#### Bab I: Pendahuluan

Pada BAB ini disajikan penjelasan umum latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan, struktur organisasi serta penjelasan singkat mengenai perjanjian kinerja organisasi.

#### **Bab II: Capaian Kinerja Triwulanan**

Pada BAB ini disajikan capaian kinerja organisasi pada periode triwulan dimaksud untuk setiap peryataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### **Bab III: Penutup**

Pada BAB ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### Lampiran:

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024
- c. Lain-lain yang dianggap perlu



#### **CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN**

Capaian kinerja di Biro Komunikasi dan Informasi Publik berkaitan dengan pencapaian tujuan dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan fungsi dari Biro KIP. Capaian kinerja di Biro KIP mencakup berbagai hal, terutama yang berhubungan dengan komunikasi dan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan.

#### 2.1 Capaian Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Pencapaian sasaran strategis kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang telah ditetapkan. Pengukuran indikator tersebut dilakukan secara periodik menggunakan tools *e-performance* yang berbasis web.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
IKK1. 1	Reputasi Positif Kementerian Perhubungan	Nilai	79	83,71	105,96
IKK1. 2	Profesionalisme ASN di Biro Komunikasi dan Informasi Publik	Nilai	75	76,04	101,39
IKK1. 3	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	75	76,11	101,48
Rata-Rat	a Capaian Sasaran Strategis				102,94

Berdasarkan tablel 2.1 dapat disimpulkan bahwa selama Triwulan IV capaian kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik untuk ketiga indikator kinerja di atas menunjukkan nilai melebihi target pada Perjanjian Kinerja Biro KIP. Salah satu indikator utama keberhasilan adalah peningkatan **Reputasi Positif Kementerian Perhubungan**. Dengan target nilai 79, capaian yang berhasil diraih mencapai **83,71**, atau **105,96%** dari target. Angka ini menunjukkan efektivitas strategi komunikasi publik yang dirancang dan dilaksanakan oleh Biro Komunikasi. Melalui berbagai kampanye kreatif, pengelolaan media sosial yang strategis, serta



hubungan media yang profesional, kementerian berhasil meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kinerjanya. Reputasi yang baik ini tentu menjadi modal penting bagi kementerian untuk terus membangun kepercayaan publik.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik juga berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini tercermin melalui indikator **Profesionalisme ASN**, di mana target nilai 75 berhasil dilampaui dengan capaian **76,04**, setara dengan **101,39%**. Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai program pelatihan, pengembangan kompetensi, serta penerapan budaya kerja yang adaptif telah berjalan dengan efektif. Dalam menghadapi tantangan era digital, profesionalisme ASN menjadi landasan penting untuk mendukung pelayanan publik yang inovatif dan responsif.

Di balik keberhasilan strategi komunikasi, **Kualitas** Penyelenggaraan **Perkantoran** juga menjadi indikator penting yang turut mendukung keberhasilan kinerja biro. Dengan target nilai 75, realisasi mencapai 76,11, atau 101,48%. Pencapaian ini mencerminkan tata kelola administrasi yang semakin baik, efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, serta penerapan teknologi informasi untuk mendukung proses kerja sehari-hari. Dengan sistem yang berjalan lancar, biro mampu memastikan bahwa seluruh tugas operasional terlaksana dengan optimal. Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis mencapai 102,94%, melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menjadi refleksi dari kepemimpinan yang visioner serta komitmen tim untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Prestasi ini tidak hanya menunjukkan kinerja yang baik, tetapi juga menegaskan peran strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam mendukung misi Kementerian Perhubungan. Dengan reputasi yang terus meningkat, profesionalisme yang terjaga, dan operasional yang efisien, biro ini telah memberikan kontribusi besar dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.



#### 2.1.1 Indikator Kinerja Kegiatan Reputasi Positif Kementerian Perhubungan

Pada Triwulan IV Tahun 2024 Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Reputasi Positif Kementerian Perhubungan sudah dilakukan dan dilaporkan pada Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV ini. Sebagai justifikasi, berikut Kriteria pada IKU Reputasi Positif Kementerian Perhubungan yang telah dikerjakan pada TW IV:

2.1.1.1 Pengelolaan Portal Lapor 2.1.1.2 Pelaksanaan Komunikasi Publik Melalui Publikasi Media Internal 2.1.1.3 Pelaksanaan Komunikasi Publik Melalui Jejaring Internal 2.1.1.4 Kampanye Kolaborasi 2.1.1.5 Perencanaan Strategi dan Evaluasi Komunikasi 2.1.1.6 Analisis Berita dan Opini Publik 2.1.1.7 Pengelolaan media sosial 2.1.1.8 Pengelolaan Jejaring Eksternal 2.1.1.9 Pengelolaan Hubungan Pers dan Media 2.1.1.10 Komunikasi Melalui Publikasi Media 2.1.1.11 Kegiatan Edukasi Publik 2.1.1.12 Dokumentasi dan Peliputan Pimpinan

#### 2.1.2 Indikator Kinerja Kegiatan Profesionalisme ASN di Biro KIP

2.1.1.13 Pelayanan Informasi Publik

Pada Triwulan IV Tahun 2024 Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Profesionalisne ASN di Biro KIP sudah dilakukan dan dilaporkan pada Laporan



Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV ini. Sebagai justifikasi, berikut Kriteria pada IKU Profesionalisne ASN di Biro KIP yang telah dikerjakan pada TW IV:

- 2.1.2.1 Pelayanan Rumah Tangga
- 2.1.2.2 Pengembangan Kompetensi SDM
- 2.1.2.3 Pembinaan Administrasi Kepegawaian

#### 2.1.3 Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran

Pada Triwulan IV Tahun 2024 Penilaian Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran sudah dilakukan dan dilaporkan pada Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV ini. Sebagai justifikasi, berikut Kriteria pada IKU Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran yang telah dikerjakan pada TW IV:

- 2.1.3.1 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- 2.1.3.2 Kendaraan Bermotor
- 2.1.3.3 Perangkat Pengelolaan Data dan Informasi
- 2.1.3.4 Pembinaan Perencanaan dan Penganggaran UPT/Satuan Kerja
- 2.1.3.5 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja UPT/ Satker
- 2.1.3.6 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran UPT/ Satker
- 2.1.3.7 Pengelolaan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan

#### 2.2 Realisasi Anggaran

Evaluasi Kinerja merupakan proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-K/L yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian Perhubungan.



Sedangkan peningkatan kualitas bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya bagi upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Pagu Alokasi Anggaran Biro Komunikasi dan Informasi Publik pada Tahun 2024 sesuai dengan Nomor DIPA: SP DIPA-022.01.1.418880/2024 tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp. 26.433.880.000.

Untuk realisasi anggaran s.d 31 Desember 2024, Biro Komunikasi dan Informasi Publik melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp. 25.294.193.335, - atau sebesar 99,92%. Adapun rincian anggaran yang sudah terserap sebagai berikut:

Tabel 2.2 Capaian Sasaran Kegiatan dan Realisasi Anggaran Biro KIP

Kode IK		TW IV					
Indikator		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%			
Capaian Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan							
IKK 1.1	Reputasi Positif Kementerian	17.072.148.000	17.056.161.258	99 91			
	Perhubungan	17.072.140.000	17.030.101.230	33,31			
IKK 1.2	Profesionalisme ASN di Biro Komunikasi dan Informasi Publik	1.273.145.000	1.273.053.326	99,99			
IKK 1.3	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	6.968.613.000	6.964.978.751	99,96			

Berdasarkan tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran s.d 31 Desember 2024, Biro Komunikasi dan Informasi Publik melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp 25.294.193.335 atau sebesar 99,92%. Melalui indikator Reputasi Positif Kementerian Perhubungan, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp17.072.148.000 berhasil direalisasikan hingga Rp17.056.161.258, mencapai tingkat penyerapan sebesar 99,91%. Angka ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien untuk mendukung berbagai program komunikasi strategis, termasuk kampanye publik, hubungan media, dan pengelolaan komunikasi krisis. Dengan penyerapan hampir sempurna, Biro memastikan bahwa setiap dana yang



digunakan memberikan kontribusi nyata dalam membangun citra positif kementerian.

Dalam rangka meningkatkan Profesionalisme ASN, Biro berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp1.273.053.326 dari total alokasi Rp1.273.145.000, dengan capaian 99,99%. Hal ini menunjukkan bahwa biro telah memaksimalkan investasi pada program pelatihan, pengembangan kompetensi, dan penerapan budaya kerja profesional di seluruh lini organisasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi landasan kokoh bagi Biro untuk menghadapi dinamika kebutuhan komunikasi publik di era modern.

Untuk mendukung Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp6.968.613.000 berhasil direalisasikan hingga Rp6.964.978.751, atau sekitar 99,96%. Tingginya tingkat penyerapan ini menunjukkan keberhasilan dalam memastikan operasional perkantoran berjalan dengan lancar, mulai dari pemenuhan kebutuhan administratif hingga penerapan teknologi informasi yang mendukung efisiensi kerja.

Keberhasilan dalam merealisasikan anggaran dengan tingkat penyerapan hampir sempurna pada semua indikator kinerja strategis mencerminkan sinergi yang kuat antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Biro Komunikasi dan Informasi Publik tidak hanya berhasil memaksimalkan penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap dana yang digunakan memberikan dampak nyata terhadap pencapaian sasaran strategis kementerian.

Capaian luar biasa ini menjadi bukti nyata profesionalisme dan dedikasi Biro dalam menjalankan tugasnya. Ke depan, tantangan untuk mempertahankan efisiensi pengelolaan anggaran dan meningkatkan dampak program tetap menjadi fokus utama. Dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, Biro berkomitmen untuk terus menjadi pelopor dalam pengelolaan anggaran yang efektif demi mendukung pelayanan publik yang berkualitas.



#### **PENUTUP**

#### 3.1 Kesimpulan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan Instansi Pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Laporan Monitoring Triwulan IV ini diharapkan dapat menjadi informasi serta masukan bagi Unit Kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi, Biro Komunikasi dan Informasi Publik berhasil mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang sangat baik dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program. Dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 99,92%, Biro memastikan setiap alokasi dana digunakan untuk mendukung strategis peningkatan Kementerian program-program seperti reputasi Perhubungan, pengembangan profesionalisme ASN, dan penyelenggaraan perkantoran yang berkualitas. Selain itu, indikator kinerja utama seperti Reputasi Kementerian Perhubungan, Profesionalisme ASN, Penyelenggaraan Perkantoran berhasil melampaui target dengan rata-rata capaian strategis mencapai 102,94%.

Pencapaian ini mencerminkan sinergi yang baik antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, serta dedikasi seluruh tim Biro KIP dalam mendukung visi dan misi Kementerian Perhubungan. Komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme menjadi landasan utama keberhasilan ini.

#### 1.2 Saran

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pencapaian yang telah diraih, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjawab tantangan ke depan. Meskipun Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah menunjukkan kinerja yang



luar biasa dalam efektivitas program maupun efisiensi anggaran, inovasi dan penguatan pada berbagai aspek tetap menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan. Oleh karena itu, saran-saran yang direkomendasikan antara lain sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Inovasi Program Komunikasi: Untuk menjaga momentum keberhasilan, diperlukan inovasi program komunikasi yang lebih kreatif dan berbasis teknologi. Kampanye digital, optimalisasi media sosial, dan strategi kolaborasi dengan komunitas dapat terus diperluas untuk meningkatkan engagement publik;
- 2. Penguatan Kapasitas SDM: Meskipun capaian Profesionalisme ASN sudah baik, penguatan kapasitas SDM tetap penting. Program pelatihan berkelanjutan, khususnya dalam bidang komunikasi digital dan analisis data, dapat meningkatkan kesiapan ASN menghadapi tantangan baru;
- 3. Peningkatan Efisiensi Operasional: Pengelolaan perkantoran yang telah efisien dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui adopsi teknologi yang lebih mutakhir. Automasi dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan dapat mengurangi beban kerja manual, sehingga lebih banyak waktu dialokasikan untuk tugas strategis;
- 4. Pengembangan Sistem Evaluasi *Real-Time*: Untuk menjaga transparansi dan meningkatkan akuntabilitas, sistem evaluasi kinerja berbasis teknologi *real-time* dapat diterapkan. Hal ini akan membantu memantau perkembangan capaian kinerja dan anggaran secara lebih cepat dan akurat;
- 5. Optimalisasi Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja: Meskipun daya serap anggaran telah mencapai tingkat yang sangat tinggi (99,92%), diperlukan optimalisasi lebih lanjut dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja. Setiap alokasi anggaran harus sepenuhnya terhubung dengan target capaian strategis untuk memastikan bahwa setiap



- pengeluaran memiliki dampak yang maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi;
- 6. Peningkatan Penggunaan Teknologi untuk Monitoring Anggaran: Sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi perlu diperkuat untuk memberikan analisis real-time terkait penggunaan anggaran. Ini akan membantu mengidentifikasi potensi kendala atau ketidakefisienan sejak dini, sehingga langkah koreksi dapat segera dilakukan;
- 7. Peningkatan Efisiensi pada Aktivitas Pendukung: Beberapa aktivitas pendukung seperti pengelolaan rumah tangga, pemeliharaan kendaraan, dan perangkat teknologi informasi dapat dioptimalkan melalui analisis kebutuhan yang lebih mendalam. Ini memungkinkan pengalihan sumber daya ke aktivitas utama yang memiliki nilai strategis lebih besar;
- 8. Evaluasi dan Penguatan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan:
  Dalam pengelolaan anggaran untuk program-program strategis,
  evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kolaborasi dengan mitra
  kerja dan pemangku kepentingan perlu dilakukan. Hal ini bertujuan
  memastikan efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran dalam kegiatan
  yang melibatkan pihak eksternal;
- 9. Peningkatan Kapasitas Analisis Dampak Pengeluaran Anggaran: Perlu dilakukan penguatan dalam analisis dampak pengeluaran anggaran untuk setiap program atau kegiatan. Langkah ini memungkinkan organisasi untuk lebih memahami kontribusi spesifik dari setiap komponen anggaran terhadap capaian indikator kinerja utama (IKK).

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan Biro Komunikasi dan Informasi Publik dapat terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat dan Kementerian Perhubungan.



#### **LAMPIRAN**

- 1.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 1.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
- 1.3 Laporan Evaluasi Semester 1 Program Komunikasi Kemenhub RI



4.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024



# PERJANJIAN KINERJA BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2024





#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

: Budi Rahardjo, S, Sos, M. Si.

Jabatan

: Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Ir. Novie Riyanto Rahardjo, MSEA.

Jahatan

: Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta.

Januari 2024

Sekretaris Jenderal

Kepala Biro

Komunikasi dan Informasi Publik

Ir. NOVIE RIYANTO RAHARDJO, MSEA,

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP.19661111 199503 1 001

Budi Rahardio, S.Sos, M.Si

Pembina Tk.I / (IV b) NIP, 19701106 199703 1 001



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	.4	5
SK 1	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	Reputasi Positif Kementerian Perhubungan	Nilai	79
SK 2	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik	Profesionalisme ASN di Biro Komunikasi dan Informasi Publik	Nilai	75
SK 3	Meningkatnya Birokrasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang Bersih dan Akuntable	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	75

$\omega$ .	-	1-	-	-
Κŧ	эcs	ıa	ta	n

Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
 Pengelolaan Organisasi dan SDM

3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum

Anggaran

Rp. 18.468.281.000 Rp. 1.571.792.000

Rp. 6.663.807.000

Sekretaris Jenderal

Jakarta, Januari 2024

Kepala Biro

Komunikasi dan Informasi Publik

Ir. Novie Rivanto Rahardio, MSEA. Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP.19661111 199503 1 001

Budi Rahardio.S.Sos. M.Si Pembina Tk.I / (IV b) NIP. 19701106 199703 1 001



#### 4.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

	RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024 BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK							
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN / KOMPONEN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya Kualitas	Kementerian Perhubungan	79	Pengelolaan Portal Lapor	117.200.000	BIRO KIP		
	Layanan					Pelayanan Informasi Publik	350.951.000	
	Komunikasi dan Informasi				Pelaksanaan Komunikasi Publik Melalui Publikasi Media Internal	1.505.000.000		
	Publik				Pelaksanaan Komunikasi Publik Melalui Jejaring Internal	350.000.000		
					Penyusunan Profil Kementerian	3.038.000		
					Kampanye Kolaborasi	1.153.592.000		
					Perencanaan Strategi dan Evaluasi Komunikasi	1.252.617.000		
					Analisis Berita dan Opini Publik	748.140.000		
					Pengelolaan media sosial	2.502.676.000		
					Pengelolaan Jejaring Eksternal	1.754.628.000		
					Pengelolaan Hubungan Pers dan Media	1.050.725.000		
					Komunikasi Melalui Publikasi Media	3.417.300.000		
					Kegiatan Edukasi Publik	1.237.978.000		
					Dokumentasi dan Peliputan Pimpinan	3.024.436.000		
2	Meningkatnya	Profesionalisme	Nilai	75	Pelayanan Rumah Tangga	180.020.000	BIRO KIP	
	Kapabilitas Kepegawaian	ASN di Biro Komunikasi dan			Pengembangan Kompetensi SDM	620.225.000		
	dan Organisasi				Pembinaan Administrasi Kepegawaian	471.547.000		
	Biro Komunikasi				Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	100.000.000		
	dan Informasi Publik				Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan	200.000.000		
3	Meningkatnya Birokrasi Biro	Kualitas Penyelenggaraan	Nilai	75	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.564.997.000	BIRO KIP	
	Komunikasi	Perkantoran			Kendaraan Bermotor	1.516.434.000		
	dan Informasi Publik yang				Perangkat Pengelolaan Data dan Informasi	707.573.000		
	Bersih dan Akuntabel				Pembinaan Perencanaan dan Penganggaran UPT/ Satuan Kerja	310.330.000		
					Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja UPT/ Satker	210.066.000		
					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran UPT/ Satker	127.454.000		
					Pengelolaan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	226.953.000		